



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI WIJAYANTI TANJUNG
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 83417

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.967.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 45 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 1.374 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
4. Tanah Seluas 99 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , Rp. 1.872.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **167.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. LAINNYA, ---(SEPEDA ONTHEL) SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARDDTOP JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, HONDA G2EO2R21LO M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000



5. MOTOR, HONDA CB 100 Tahun 1971, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
6. MOTOR, HONDA C 70 Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
7. MOTOR, HONDA H1B02N41L0 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 74.147.500

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.903.970

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.241.051.470

III. HUTANG Rp. 1.364.778.432

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.876.273.038

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.